

2020

LAPORAN TAHUNAN

LOMBOK RESEARCH CENTER



LAPORAN TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN LOMBOK RESEARCH CENTER



2020

DAFTAR ISI

Judul	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
Pendahuluan	2
Kajian Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan Lombok Timur.....	3
Kampung SEHAT : Penguatan Literasi Penanganan Covid-19 Di NTB	9
Pengembangan Potensi Usaha Ekonomi Produktif Di Kabupaten Bima Dan Kota Bima Untuk Mendukung Tahun Pariwisata Provinsi NTB 2021	12

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan Puji Syukur Alhamdulillah, Laporan Tahunan **Lombok Research Center (LRC)** tahun 2018-2020 akhirnya dapat kami selesaikan. Laporan ini berisi tentang kegiatan dan capaian program yang dijalankan oleh Lembaga Lombok Research Center selama tahun 2020. Melalui laporan ini LRC dapat melakukan refleksi dan evaluasi program yang telah dijalankan selama 1 tahun, sehingga dapat digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan kegiatan selanjutnya.

Pada kurun tahun 2018-2020 LRC telah melakukan kerja-kerja kemitraan dan penguatan masyarakat sipil. LRC bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB). Melalui kerjasama tersebut LRC telah melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan melalui 3 program besarnya yaitu **Kajian Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan Lombok Timur, Kampung Sehat : Penguatan Literasi Penanganan Covid-19 Di NTB, dan Pengembangan Potensi Usaha Ekonomi Produktif Di Kabupaten Bima Dan Kota Bima Untuk Mendukung Tahun Pariwisata Provinsi NTB 2021.**

Selain berbagai hal tersebut, tahun ini LRC juga melakukan peninjauan atas rencana strategis 5 (lima) tahun lembaga 2020-2025. Ada beberapa capaian dan keberhasilan, tetapi dengan kerendahan hati dan kejujuran tetap harus diakui juga bahwa terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi. Dokumen tersebut pun harus disesuaikan di beberapa bagian untuk memastikan kualitas pelayanan yang terbaik. Pilihan untuk selalu melakukan yang terbaik dan memilih untuk tidak melakukan jika tidak bisa menjamin kualitas hasil adalah nilai kerja yang tidak bisa ditawar.

Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari segenap Organ Pengurus dan seluruh staf LRC yang telah membagikan apapun yang dapat diberikan pada setiap kegiatan LRC.



S U H E R M A N

Direktur Lombok Research Center

Pendahuluan

Tahun 2020 merupakan tahun yang dapat dikatakan sebagai tahun yang penuh tantangan. Pandemi Covid-19 yang telah mengubah tatanan dunia, tidak terkecuali bagi kami Lembaga Lombok Research Center (LRC). Untuk itu, LRC harus dan perlu untuk melakukan beberapa upaya sebagai langkah adaptasi pada beberapa program kegiatan di tengah pandemi Covid-19.

Terdapat beberapa tantangan baik itu eksternal maupun internal bagi LRC yang harus dihadapi. Adapun beberapa tantangan tersebut diantaranya, Pertama, terjadinya struktur tatanan baru dalam ekonomi. Dalam hal ini, LRC melihat bahwa masyarakat pulau Lombok belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana alam gempa bumi yang terjadi pada pertengahan tahun 2018 yang lalu dan membekas hingga tahun 2019 serta ditambah lagi dengan Pandemi Covid-19 yang terjadi tahun ini.

Untuk itu, LRC berkepentingan untuk melakukan berbagai upaya advokasi dan memastikan bahwa masyarakat yang didampingi dapat melalui tatanan baru ini. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan peningkatan ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia.

Dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tengah masa pandemi Covid-19, LRC tetap melakukan kerja pemberdayaan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Hal ini juga diterapkan melalui berbagai kegiatan edukasi kepada masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat berada di lingkungan kerja.

Secara umum di tahun 2020 ini, capaian-capaian kerja LRC menunjukkan bahwa kerja-kerja riset dan pemberdayaan masyarakat masih on the track, berada dalam jalur berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun dalam suasana “New Normal” Pandemi Covid-19. Beberapa kegiatan riset dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai pihak dapat terlaksana meskipun terkendala tantangan internal yaitu semakin berkurangnya sumber dana dan sumber daya manusia di tingkat sekretariat LRC.

Awal yang telah terbangun dari beberapa institusi/lembaga yang selama ini menjalin kemitraan dengan LRC dan telah memberikan jaminan untuk mengawal program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LRC dan (3) semakin menguatnya soliditas

masyarakat sipil di tingkat lokal. Sedangkan untuk kekuatan di tingkat internal yang dapat didayagunakan adalah ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kerja-kerja pemberdayaan masyarakat serta riset di tingkat staf LRC.

Kajian Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan Lombok Timur

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Sebagaimana diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2023, dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi, secara bertahap dilakukan dengan transformasi dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif SDA yang melimpah di masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Upaya itu dilakukan dengan prinsip dasar mengelola secara berkelanjutan, peningkatan produktivitas melalui penguasaan penyebaran, penerapan, dan penciptaan (inovasi) iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan, mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik, dan mengelola secara berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah.

Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional diarahkan untuk: (1) Memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan di dalam negeri, (2) Mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, (3) Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan pengetahuan, dan (4) Membangun infrastruktur yang maju serta melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia, secara lebih sederhana dibedakan dalam bentuk pembangunan sektoral dan pembangunan regional. Pembangunan sektoral merupakan perencanaan dan realisasi pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan atas kepentingan nasional, sedang pembangunan regional merupakan perencanaan dan realisasi pembangunan yang sesuai dengan skala prioritas pembangunan di tingkat daerah yang berotonomi. Dalam konteks pembangunan regional, pemerintah telah menggariskan suatu kebijakan yang menghendaki agar pembangunan tidak dilaksanakan secara terpusat melainkan diharapkan melalui pembangunan daerah sehingga dapat membangkitkan prakarsa serta partisipasi masyarakat secara luas untuk turut serta

dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kondisi wilayahnya.

Namun, konsekuensi dari implementasi otonomi daerah tersebut maka, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali dan mengembangkan potensi ekonominya secara mandiri. Pengembangan potensi ekonomi ini diharapkan dapat memperkecil rentang ketimpangan pembangunan antar wilayah secara bertahap. Oleh karena itu, salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah adalah kemampuan masing-masing daerah untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada secara optimal. Selain mengolah potensi ekonomi yang potensial tersebut menjadi ekonomi riil maka potensi yang ada tersebut juga harus mampu memiliki daya saing sehingga mampu bersaing dengan daerah lain dan berorientasi ekspor.

Dalam rangka peningkatan roda perekonomian daerah agar berhasil dan berdaya guna, maka perlu diupayakan pengembangan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan produk unggulan daerah. Dimana proses ini dilakukan dengan melakukan identifikasi dan pemetaan potensi produk-produk unggulan yang ada di daerah sebagai proses pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lokal serta optimalisasi atas potensi ekonomi yang ada di daerah tersebut.

Sebagai suatu strategi pembangunan daerah, pengembangan produk-produk unggulan daerah dinilai mempunyai kelebihan karena dianggap daerah yang menerapkan pola pembangunan ini relatif lebih mandiri dalam pengembangan ekonominya. Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk, menciptakan nilai tambah (*value added*), memanfaatkan sumber daya secara nyata, menciptakan kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasi.

Disamping itu, produk unggulan daerah merupakan produk unggulan yang memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain serta berdaya saing handal dan dapat memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat lokal. Produk unggulan daerah juga berorientasi ramah lingkungan dan berorientasi pada pasar lokal maupun nasional serta berorientasi pasar ekspor. Pengembangan produk unggulan merupakan strategi yang efektif dalam pengembangan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengembangan produk unggulan sebagai potensi ekonomi daerah pada era otonomi adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan pengembangan produk unggulan daerah terkait erat

dengan kemauan politik atau kebijakan dari pemerintah daerah. Untuk itu, peranan pemerintah daerah sangat penting dalam pengembangan dan pemberdayaan produk unggulan daerah tersebut sebagai salah satu upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah.

Terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah tersebut, Kabupaten Lombok Timur belum memiliki kriteria dan data produk unggulan. Namun berdasarkan potensi yang dimiliki dari sektor pertanian maka beberapa produk unggulan di bidang tanaman pangan adalah Padi, Jagung dan Kedelai. Produk unggulan di bidang hortikultura adalah Cabe, Bawang putih dan Kentang. Sementara di bidang perkebunan komoditi yang menjadi unggulan adalah Tembakau dan Kelapa. Selain bidang pertanian, potensi laut didalamnya termasuk perikanan tangkap juga menjadi salah satu unggulan Kabupaten Lombok Timur. Oleh karena itu, melalui kajian peningkatan nilai tambah produk unggulan ini akan menjadi lokomotif tumbuh dan berkembangnya produk-produk unggulan lainnya dan dapat menjadi alternatif bagi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Timur dimasa mendatang.

Output Program

- Teridentifikasinya produk unggulan Lombok Timur yang berpotensi untuk dikembangkan dan berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Tersusunnya strategi dalam upaya peningkatan nilai tambah produk unggulan Lombok Timur
- Rekomendasi kebijakan dan strategi peningkatan PAD Lombok Timur.

Peluang Program

Didalam program penelitian ini, Lombok Research Center (LRC) melihat beberapa peluang yang outputnya selain peningkatan PAD juga secara tidak langsung adalah peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur. Peluang tersebut dapat didukung oleh sebagian besar produk unggulan yang dihasilkan di Kabupaten Lombok Timur tersebut memiliki pasar yang jelas namun, belum dimaksimalkan potensinya oleh pemerintah daerah.

Tabel Distribusi PDRB Kabupaten Lombok Timur ADH Berlaku Menurut Kategori Tahun 2015-2019 (Persen)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.44%	28.21%	28.16%	28.04%	27.06%
Pertambangan dan Penggalian	5.80%	5.93%	6.08%	6.18%	6.66%
Industri Pengolahan	7.95%	7.72%	7.52%	7.18%	6.98%
Listrik dan Gas	0.06%	0.07%	0.08%	0.08%	0.08%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.08%	0.08%	0.08%	0.07%	0.07%
Konstruksi	11.08%	11.32%	11.36%	11.31%	11.98%
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.19%	16.48%	16.79%	17.17%	17.52%
Transportasi dan Pergudangan	4.37%	4.28%	4.19%	4.17%	4.22%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.96%	1.00%	1.01%	1.02%	1.05%
Informasi dan Komunikasi	1.68%	1.66%	1.70%	1.69%	1.66%
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.35%	2.53%	2.64%	2.69%	2.57%
Real Estate	3.59%	3.63%	3.60%	3.65%	3.60%
Jasa Perusahaan	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	7.88%	7.56%	7.25%	7.09%	6.83%
Jasa Pendidikan	5.33%	5.34%	5.32%	5.37%	5.39%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.13%	2.09%	2.05%	2.12%	2.15%
Jasa Lainnya	2.01%	2.00%	2.03%	2.05%	2.07%
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu daerah otonom yang menjadi bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah ± 2.679,88 km² yang terdiri dari daratan seluas 1.605,55 km² (59,91 %) dan lautan seluas 1.074,33 km² (40,09 %) yang terdiri dari 21 Kecamatan. Secara umum, wilayah Kabupaten Lombok Timur memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi, sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya kegiatan pertanian, perkebunan dan bahkan juga perikanan.

Dalam periode tahun 2015-2019 ketiga sektor ini menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian Kabupaten Lombok Timur (Tabel 1). Menurut Data Badan Pusat Statistik kontribusi sektor tiga sektor ini sebesar 27,06 persen atau 5.496 miliar rupiah dari total 20.306 miliar rupiah PDRB Lombok Timur.

Besarnya kontribusi sektor pertanian tidak lepas dari dukungan potensi luas lahan yang tersedia. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur menyebutkan potensi luas lahan pada tahun 2019 adalah 160.554 hektar yang terdiri dari 47.598 ha merupakan lahan sawah, 75.787 lahan kering, dan 37.169 ha lahan bukan pertanian.

Komoditas pertanian sektor tanaman pangan di Kabupaten Lombok Timur masih didominasi oleh Padi, Jagung, dan Ubi Kayu. Produksi Padi pada tahun 2019 di Kabupaten Lombok Timur mencapai 397.343 ton, sedangkan produksi Jagung pada tahun yang sama mencapai 151.849 ton dan diikuti oleh tanaman Ubi Kayu sebanyak 16.445 ton. Selain itu, tanaman hortikultura juga menjadi salah satu potensi komoditas pertanian di daerah ini. Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai, dan Tomat menjadi komoditas utama dalam sektor

pertanian hortikultura. Produksi Bawang Merah dan Bawang Putih pada tahun 2019 mencapai 10.707 ton dan 17.236 ton. Kemudian untuk produksi Cabai mencapai 158.415 ton dan 22.305 ton jumlah produksi Tomat pada tahun yang sama.

Selain itu, pada sektor perkebunan terdapat juga komoditas Tembakau yang produksinya pada tahun 2019 mencapai 39.645 ton. Dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur, sebagian besar menyumbang pada produksi Kelapa di daerah ini dimana, produksi Kelapa di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 9.476 ton pda tahun 2019. Salah satu komoditi perkebunan yang sedang berkembang saat ini di Kabupaten Lombok Timur adalah tanaman Kopi. Adapun jumlah produksi Kopi pada tahun 2019 mencapai 639 ton.

Sejalan dengan visi Kabupaten Lombok Timur tahun 2018-2023 di bawah kepemimpinan Bupati H.M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi SJ yaitu mewujudkan **Lombok Timur Yang Adil, Sejahtera, dan Aman** dimana, salah satu upaya mewujudkannya adalah menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.

Produk atau komoditas unggulan daerah ini akan menggambarkan kemampuan daerah didalam menghasilkan berbagai produk dan komoditas, penciptaan nilai tambah melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada secara nyata dan membuka lapangan dan kesempatan kerja yang lebih luas dan beragam. Ujung dari semua ini adalah mendatangkan manfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat maupun pemerintah daerah, dan tentunya juga akan memiliki prospek dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestik dan bahkan mampu menjadi komoditas ekspor.

Tantangan Program

Tentunya didalam setiap pelaksanaan program kegiatan, LRC tidak selalu berjalan mulus. Hal ini terutama karena terdapat beberapa tantangan yang menjadi bahan evaluasi pada program-program sejenis di masa yang akan datang.

Pertanian di Lombok Timur menjadi tulang punggung utama perekonomian daerah dengan produk unggulannya Hortikultura. Untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan harus fokus pada dua hal yaitu pada aspek budidaya dan aspek pasca panen.

Iklim investasi dan iklim bisnis yang masih belum kondusif. Untuk mempercepat laju investasi di bidang hortikultura dan agribisnis diperlukan beberapa kebijakan pendukung antara lain penciptaan iklim investasi yang makin kondusif antara lain melalui tindakan mempercepat perizinan bagi UMKM yang melakukan pengolahan hasil. Demikian juga pemberian rangsangan kepada pengusaha umkm yang melakukan pengolahan hasil produk pertanian, serta kepastian hukum dan keamanan baik untuk usaha maupun lahan bagi pertanian.

Pengembangan dan perbaikan infrastruktur di beberapa wilayah sentra hortikultura dan pertanian lainnya masih belum memadai seperti perbaikan jalan, jembatan, transportasi, komunikasi serta sumber energi listrik. Demikian juga belum adanya kawasan terpadu yang memberikan akses guna peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian beserta produk turunannya tersebut.

Diperlukan komitmen bersama pemerintah daerah, petani dan privat sektor dalam pengembangan sektor pertanian di Lombok Timur.

Kampung SEHAT : Penguatan Literasi Penanganan Covid-19 Di NTB

Program Kampung SEHAT merupakan akronim dari kampung/dusun yang Steril, Ekonomi produktif, Harmonis, Asri, dan Tangguh. Untuk memutus rantai penyebaran virus Corona maka, lingkungan harus steril atau bersih baik dari aspek kesehatan, bersih dari berbagai tindakan kriminalitas dan penyebaran berbagai paham radikal dan intoleran serta berbagai kegiatan yang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Kondisi lingkungan yang sudah steril dan bersih akan meningkatkan gairah masyarakat serta dapat menimbulkan berbagai ide-ide kreatif yang akan menunjang kegiatan perekonomian masyarakat sekaligus sangat berguna untuk menjaga ketahanan pangan dapat terus berlangsung. Penanganan penyebaran virus Corona melalui pendekatan peningkatan nilai sosial budaya masyarakat akan menimbulkan nilai kebersamaan sehingga, akan berdampak pada kehidupan masyarakat NTB yang harmonis baik dalam aspek hubungan sosial kemasyarakatan maupun hubungan antara masyarakat dengan alam.

Sinergi yang terbangun dalam hubungan sosial budaya masyarakat dan hubungan manusia dengan alam yang terimplementasikan menjadi rasa gotong royong membersihkan dan menjaga kebersihan lingkungan yang semakin tumbuh secara tidak langsung akan berdampak pada terwujudnya lingkungan yang asri. Sampah dapat dikelola secara maksimal, kotoran ternak dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, kehidupan sosial ekonomi masyarakat berjalan dengan penuh rasa aman-nyaman, kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan semakin terlihat dan jauh dari gangguan kamtibmas serta paham radikal dan intoleran akan menjadikan lingkungan (kampung/dusun) menjadi tangguh dalam menghadapi berbagai guncangan kehidupan yang datang.

Output Kegiatan

1. Timbulnya kesadaran masyarakat berkolaborasi dan mendukung tugas pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban
2. Terciptanya ketahanan pangan masyarakat melalui potensi lokal yang dimiliki serta semakin tumbuhnya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat
3. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan baik itu kebersihan rumah maupun kebersihan lingkungan sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus Corona

4. Tumbuhnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

Peluang Kegiatan

Pandemi Covid-19 memberikan peluang terhadap peningkatan kualitas hubungan sosial masyarakat melalui berbagai kegiatan interaksi sosial seperti semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama serta ada upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum melalui kegiatan pos ronda.

Selain itu, melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang dilakukan oleh masyarakat juga memiliki dampak terhadap dukungan pada program ketahanan pangan yang digalakkan oleh pemerintah sekaligus sebagai upaya masyarakat untuk meminimalisir pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Kegiatan ini juga terbukti mampu menjadikan masyarakat lebih produktif terutama terkait dengan adaptasi ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yaitu melalui berbagai kegiatan-kegiatan produktif yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan memaksimalkan potensi lokal yang tersedia untuk menjadi sesuatu barang yang memiliki nilai tambah.

Tantangan

1. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) perlu memaksimalkan peran Bintara Pembina Desa (BABINSA) TNI dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) Polri terutama dalam pelibatan sektor pertanian.

Tugas perbantuan terhadap pemerintah daerah ini penting untuk lebih ditingkatkan dalam rangka mengakselerasi capaian dari tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah program ketahanan pangan dimana, pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mendukung peran petugas penyuluh lapangan (PPL) yang masih terkendala pada persoalan keterbatasan SDM.

2. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memfasilitasi peningkatan kapasitas dalam bentuk pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada berbagai kegiatan pelatihan terutama yang terkait dengan ketahanan pangan.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengikutsertakan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam setiap pelatihan terutama terkait dengan program ketahanan pangan sehingga, personil Babinsa dan Bhabinkamtibmas memiliki pengetahuan yang maksimal guna mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

3. Pemerintahan Desa di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB lebih meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah masing-masing untuk terus membangun kesadaran masyarakat terkait dengan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19.

Memaksimalkan peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas di desa dapat dilakukan melalui penganggaran untuk menyediakan tempat tinggal sementara bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Hal ini karena untuk wilayah Provinsi NTB secara umum personil TNI dan Polri yang ditempatkan di desa bukan berasal dari wilayah tersebut. Kondisi ini akan berdampak pada kurang optimalnya peran personil Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mendukung program pemerintah daerah terutama terkait dengan akselerasi capaian program ketahanan pangan.

Pengembangan Potensi Usaha Ekonomi Produktif Di Kabupaten Bima Dan Kota Bima Untuk Mendukung Tahun Pariwisata Provinsi NTB 2021

Seiring perubahan paradigma pembangunan desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimana, desa saat ini menjadi subyek utama pembangunan. Saat ini desa diberikan kewenangan atas azas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan (eksistensi) desa. Sedangkan subsidiaritas berarti penggunaan kewenangan skala lokal. Program pembangunan perekonomian desa harus mampu meningkatkan kapasitas, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing perekonomian perdesaan untuk dapat memberikan kontribusi pada pembangunan perekonomian nasional.

Namun, pengembangan usaha ekonomi produktif di desa seringkali menghadapi berbagai permasalahan, antara lain seperti; 1) adanya keterbatasan penguasaan sumber daya alam yang menyebabkan kurangnya peluang dalam berusaha di bidang ekonomi dan pertanian, 2) kemiskinan struktural dimana meskipun tetap berusaha namun, pendapatan yang diperoleh masih belum dapat memenuhi kebutuhan keluarga, 3) tingkat pengetahuan yang terbatas terutama mengenai peluang-peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan, 4) belum optimalnya fungsi kelembagaan aparat dan masyarakat, 5) akses permodalan, lembaga pemasaran, informasi, dan teknologi yang masih terbatas. Hal ini tentunya dapat mendorong terjadinya kerawanan pangan dan kerentanan sosial yang ada di tengah masyarakat.

Tahun Wisata NTB 2021 yang ditandai dengan pegelaran Motogp di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika merupakan suatu peluang untuk menumbuhkan berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat sebagai daya dukung dari program pemerintah daerah NTB. Kabupaten Bima dan Kota Bima memiliki beragam potensi seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dapat menjadi wilayah penyangga ekonomi terutama untuk dukungannya terhadap sektor pariwisata NTB. Oleh karena itu, diperlukan suatu pemetaan mengenai berbagai potensi unggulan daerah yang bertujuan untuk mengetahui prospek pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat dan menjadi alternatif bagi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi pada kedua wilayah ini.

Output Kegiatan

1. Adanya gambaran awal mengenai usaha ekonomi produktif masyarakat sebagai daya dukung pelaksanaan Tahun Wisata NTB 2021
2. Adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi produktif
3. Terbangunnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan potensi wilayah dan peningkatan ketahanan pangan melalui usaha ekonomi produktif yang tercipta.

Peluang

Pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bima dan Kota Bima terhadap pengembangan UMKM harus lebih mengarah pada kesejahteraan sosial dengan mengedepankan tujuan keadilan sosial, keseimbangan pembangunan antar wilayah di kedua daerah otonom ini.

Keberadaan UMKM di Kabupaten Bima dan Kota Bima terlihat hanya sebagai entitas yang vulnerable sehingga perlu untuk memperoleh perlindungan. Kebijakan ini seringkali berimplikasi pada berbagai program yang disusun dan diimplementasikan tidak berdasarkan orientasi bisnis tetapi lebih bersifat sosial. Pendekatan sosial tidak akan menghasilkan UMKM di Kabupaten Bima dan Kota Bima memiliki daya saing.

Beberapa hal yang menjadi kendala perkembangan UMKM di Kabupaten Bima dan Kota Bima sehingga, berdasarkan evaluasi kami terhadap faktor-faktor tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kinerja UMKM Kabupaten Bima dan Kota Bima seperti, pemerintah daerah harus mengedepankan fasilitas untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap input, pendanaan dan pasar.

Untuk itu, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dan stakeholder lainnya didalam upaya pengembangan UMKM di Kabupaten Bima dan Kota Bima.

1. Intervensi pada sumber daya manusia

Intervensi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif dapat dilakukan melalui kolaborasi diantara pelaku UMKM dalam sebuah forum sehingga, terbangun komunikasi dan transfer pengetahuan diantara pelaku UMKM. Selain

itu, kolaborasi antara pelaku UMKM dengan pemerintah daerah sangat penting terkait dengan sinkronisasi kebijakan pemerintah dan kegiatan ekonomi kreatif masyarakat.

2. Memaksimalkan dan mendekatkan teknologi pada pelaku UMKM

Terkait dengan kendala dalam hal kemasan produk UMKM, pemerintah daerah perlu untuk memfasilitasi keberadaan Rumah Kemasan. Semua hal yang terkait dengan desain label, merk, dan bentuk kemasan dapat difasilitasi oleh Rumah Kemasan sehingga, para pelaku ekonomi kreatif yang dalam hal ini adalah pelaku UMKM tidak perlu lagi terkendala pada persoalan kemasan.

3. Perkuat dukungan

Memperkuat dukungan juga tidak hanya terkait dengan pemerintah daerah namun, lebih kepada dukungan berbagai stakeholder lainnya. Pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bima dan Kota Bima perlu untuk ditingkatkan lagi sebagai salah satu upaya mengatasi keterbatasan modal yang dialami oleh para pelaku UMKM di kedua daerah ini.

Selain itu, pelibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pemberdayaan juga penting untuk dilakukan kolaborasi terutama dalam hal pendampingan bagi pelaku UMKM. Pemerintah daerah juga harus secara rutin melakukan kegiatan sosialisasi dan transfer pengetahuan teknologi, manajemen usaha, peluang pasar, dan berbagai informasi terkait dengan akses keuangan.

4. Kondusifitas Daerah

Untuk menjaga kondusifitas daerah maka, program-program pembangunan yang dilaksanakan lebih diarahkan kepada upaya penciptaan lapangan kerja. Salah satu contohnya adalah memfasilitasi kegiatan produktif yang memiliki nilai ekonomi terutama lebih diarahkan kepada generasi muda di kedua daerah otonomi ini. Selama ini pemicu berbagai konflik komunal lebih disebabkan karena lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada.